

RENCANA KERJA POLRES METRO TANGERANG KOTA T.A. 2021

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari tahapan keempat Rencana Strategi Polri Tahun 2020-2024 *Strive for Excellence* (mencapai keunggulan) yaitu dengan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung SDM berkualitas guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dalam mendukung Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Polres Metro Tangerang Kota T.A. 2021 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar keamanan laut; dan (4) pilar keamanan dan ketertiban.

Rencana Kerja Polres Metro Tangerang Kota disusun dengan memperhatikan tema pembangunan bidang keamanan pada RPJMN 2020-2024, dimana tema tersebut adalah "Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat" dengan sasaran pembangunan bidang Hankam Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Penguatan Pertahanan Nasional dan Kamdagri" dengan sasaran bidang yang akan dicapai adalah: (1) Terpenuhinya Alusista yang didukung industri pertahanan; (2) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme personel; (3) meningkatnya profesionalisme; (4) menguatnya intelijen dan kontra intelijen; (5) menguatnya keamanan perairan; (6) menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba; (7) terbangunnya sistem keamanan. Capaian atas pelaksanaan tugas Polres Metro Tangerang Kota sampai saat ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan dengan ditandai semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Berbagai keberhasilan yang dicapai Polres Metro Tangerang Kota dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas dan kejahatan khususnya tindak pidana terorisme, Narkoba maupun kejahatan transnasional lainnya yang dinilai cukup berhasil dan mendapat apresiasi yang positif sehingga dapat mendukung pembangunan.....

pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai Polda Metro Jaya tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh elemen dan partisipasi masyarakat serta berbagai *Stakeholder* yang terkait dengan tugas Kepolisian. Setiap capaian prestasi tersebut tidak serta merta membuat Polres Metro Tangerang Kota puas dan berbangga diri namun menjadi tantangan bagi Polres Metro Tangerang Kota dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Seiring dengan capaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya Polres Metro Tangerang Kota masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian yang sampai saat ini dinilai belum terpenuhi. Tantangan dan harapan masyarakat maupun pemerintah terhadap Polri tersebut antara lain: (1) Polri memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tentram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap setiap kejahatan serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Tantangan Polres Metro Tangerang Kota dalam pelaksanaan tugas Kepolisian ke depan semakin besar, hal ini sebagai implikasi dari perkembangan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional. Pengaruh lingkungan strategis tersebut telah menjadi fenomena yang harus dihadapi Polri dalam era globalisasi saat ini, dimana dunia telah berkembang seolah tanpa batas seiring dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.

Perkembangan yang pesat ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya bangsa yang berdampak pada berkembangnya perilaku-perilaku negatif masyarakat yang mempengaruhi situasi Kamtibmas.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin

berkembangnya.....

berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait pencemaran lingkungan, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polres Metro Tangerang Kota T.A. 2021.

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategi tersebut akan digunakan sebagai bahan analisa penyusunan Rencana Kerja Polres Kota Tangerang Tahun 2021 yang digambarkan sebagai berikut :

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Global

Lingkungan Strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik adalah sebagai berikut :

- a) langkah pemerintah Amerika Serikat yang mengubah focus ke Asia sehingga membebani Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan untuk mendorong dan menyeimbangkan berbagai konflik di ASIA. Pasukan Amerika Serikat di Asia membuat ketegangan meningkat;
- b) Masih memanasnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok sangat berpengaruh terhadap perekonomian global termasuk Indonesia.
- c) Fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian global. Fluktuasi diakibatkan oleh situasi politik negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal, juga diakibatkan meningkatnya konsumsi BBM serta menurunnya cadangan minyak bumi, maupun aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional;

d. berkembangnya

- d) berkembangnya kelompok radikal yang berbasis agama telah meresahkan masyarakat dunia. Para ulama dunia menyatakan kecemasan yang sama bahwa radikalisme yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk membangun persatuan dan kesatuan demi menghadapi kondisi yang dihadapi oleh umat islam di dunia itu menekankan keharusan meninggalkan kekerasan, radikalisme, terorisme dan bagaimana membawa pada persatuan dan kemanusiaan.
- e) kerusuhan politik, pergolakan sosial, dislokasi ekonomi dan bencana ekologis memiliki kontribusi terhadap pergerakan orang di seluruh batas nasional satu negara di kawasan selatan ke tempat lain. Perpindahan penduduk secara massal semakin menarik perhatian pembuat kebijakan, tidak hanya untuk alasan kemanusiaan, tetapi juga karena mereka menciptakan instabilitas dalam negeri, menghasilkan ketegangan antarnegara dan mengancam keamanan internasional karena imigran ilegal termasuk penjualan senjata, narkoba dan pencucian uang.
- f) Pandemi virus corona 19 telah tersebar di 176 negara, hal ini sangat mempengaruhi perekonomian dunia.

2) Regional

Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi oleh beberapa isu, yaitu Konflik Politik dan keamanan dikawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara baik perbatasan darat, laut dan udara, kerjasama antar negara ASEAN dibidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:

- a) masih berlanjutnya interaksi hubungan Cina dengan kekuatan utama di kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Uni Eropa merupakan factor berpengaruh dalam peta keamanan kawasan khususnya di Asia-Pasifik;
- b) memanasnya hubungan bilateral antara Indonesia –Australia yang mengalami pasang surut, karena Australia mempunyai kepentingan dengan Indonesia dalam menangkal terorisme dan manusia perahu/pencari suaka;

c) Konsep

- c) Konsep keamanan Laut Australia Marine Identification Zone (AMIZ) yang menjangkau perairan utara Indonesia meliputi Laut Halmahera, Laut Sulawesi dan sebagian Laut Jawa sampai dengan perairan Selandia Baru dapat menimbulkan sengketa perbatasan;
 - d) iklim investasi yang ditawarkan oleh Vietnam sangat kondusif, sehingga memiliki daya tarik terhadap penanaman modal asing. Vietnam saat ini memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga merupakan mitra kerja sama yang potensial bagi Indonesia. Hubungan bilateral dengan Indonesia saat ini dikembangkan melalui kerja sama anti korupsi, kebudayaan, perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya energi serta bidang pertahanan dan keamanan;
 - e) tindak pidana penyelundupan senjata api dari Australia melalui selat Torres ke PNG yang ditukarkan dengan Narkoba dan Minuman keras. Beberapa wilayah di PNG masih dimanfaatkan oleh TPN/OPM untuk melakukan kegiatan Separatis dan menjadikan PNG sebagai tempat pelarian atau persembunyian dari kejaran aparat keamanan Indonesia masih menjadi salah satu isu antarnegara Indonesia dan PNG. Masalah perbatasan antara RI dan PNG sampai saat ini masih belum dapat ditentukan secara yuridis formal, namun telah diambil langkah-langkah bersama dengan mendirikan Pos-Pos perbatasan untuk merintis tapal batas yang ditetapkan kemudian;
- 3) Nasional
- Lingkungan strategi Nasional tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astagatra, Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibmas dari Aspek Astagatra :
- a) Geografi
 - (1) Kondisi geografi wilayah Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan tetangga sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnasional, termasuk pencurian ikan diperairan wilayah Indonesia;

(2) Kondisi

- (2) Kondisi geografi wilayah Indonesia yang masuk dalam Ring of Fire Pasific (Sabuk api Pasific) dan sabuk Alpine. Indonesia rawan gempa bumi tektonik;
 - (3) Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman tapi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyeludupan kayu dan narkoba.
- b) Demografi
- (1) Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar, penyebaran yang tidak merata dan tidak diimbangi penyediaan lapangan perkerjaan;
 - (2) sebagai bangsa yang heterogen Indonesia yang bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat istiadat berpeluang terjadi konflik komunal (SARA);
- c) Sumber Daya Alam
- (1) Indonesia yang memiliki kekayaan alam sangat berlimpah tidak hanya berupa bahan tambang tetapi juga hutan, air dan tanah yang subur dan laut yang sangat luas. Hal inilah yang sering diperebutkan negara lain;
 - (2) sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya menjadi incaran negara asing dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah;
- d) Ideologi
- (1) penganut paham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendikiawan dan kelompok masyarakat yang menuntut dan memperjuangkan “kebebasan” tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;
 - (2) Kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi massa dan LSM sepaham dengan ajaran komunisme mengangkat isu pelanggaran HAM mencabut Ketetapan MPRS Nomor : XXV/MPRS/1966, sehingga ajaran komunis hidup kembali yang disebut dengan neo komunisme (komunisme gaya baru)
- e) Politik

e) Politik

- (1) Sistem politik demokrasi bertumpu pada kedaulatan rakyat ditopang budaya politik sehat yaitu perilaku santun mengedepankan perdamaian, anti kekerasan dalam berbagai bentuk dan sifat sportif diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat dan efektif;
- (2) pelaksanaan politik luar negeri diselaraskan kepentingan rakyat, diplomasi dilakukan adalah pro rakyat. Secara mendetail, rencana politik luar negeri dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden RI JAKA Widodo, khususnya tiga pilar Trisakti yaitu politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari dan budaya yang berkepribadian;

4) Daerah Ibukota Jakarta dan Sekitarnya

a) Geografi

- (1) daerah hukum Polda Metro Jaya meliputi wilayah DKI Jakarta dan sebagian Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok serta sebagian Provinsi Banten yakni Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- (2) Posisi wilayah DKI Jakarta memiliki karakteristik yang berbatasan dengan Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor dan laut Jawa, pada waktu-waktu tertentu apabila hujan deras dan terus menerus di wilayah hulu menyebabkan banjir di sekitar / sepanjang aliran kali ciliwung, sebagian wilayah Utara kota Jakarta digenangi oleh air laut yang pasang sehingga menyebabkan terjadinya banjir dan aktivitas masyarakat nelayan terganggu.
- (3) wilayah Polda Metro Jaya merupakan wilayah pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat perindustrian, pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping sebagai Kota Metropolitan. Situasi dan kondisi tersebut Jakarta menjadi kota tempat bertemunya berbagai bangsa dengan berbagai latar belakang kepentingan, budaya juga berbagai suku dan agama;
- (4) kondisi masyarakat heterogen baik dari segi sosial budaya, sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang merata, merupakan potensi

timbulnya.....

timbulnya kerawanan/konflik antar kelompok dan kepentingan yang dapat mengganggu Kamtibmas. Dalam persaingan antar kelompok mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan;

- (5) letak geografi Jakarta yang strategis sebagai pintu masuk berbagai hal dari luar negeri sehingga sebagai etalase bagi masyarakat internasional dalam memandang Indonesia. Berbagai permasalahan keamanan muncul seperti keimigrasian dan penyelundupan orang, barang dan Narkoba.

b) Demografi

- (1) sebagai pusat pemerintahan, dan Ibukota Negara maka Kota Jakarta menjadi sasaran, dan tujuan kedatangan masyarakat dari seluruh Indonesia dengan berbagai harapan, sehingga berbagai suku dari seluruh Indonesia terdapat di kota Jakarta, sedangkan Warga Betawi sebagai penduduk asli sudah mulai tergusur keberadaannya. Di samping penduduk Indonesia asli, di Jakarta tidak sulit untuk menemukan warga negara asing dari berbagai negara di dunia, hal tersebut tidak terlepas dari posisi kota Jakarta sebagai Ibukota Negara dan pintu gerbang Indonesia;
- (2) dengan jumlah penduduk yang besar di samping sebagai modal dasar pembangunan juga mengandung kerawanan dengan dimensi kerawanan yang luas dan kompleks. Hal tersebut disebabkan masih belum berimbang laju penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia dan sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut adalah tingginya angka pengangguran di Jakarta.

c) Sumber Daya Alam

- (1) Penambangan pasir masih dapat ditemukan di wilayah Tangerang dan Bekasi. Pada umumnya penambangan pasir masih dilakukan secara tradisional dan di jual sebagai bahan bangunan. Sementara di beberapa daerah Bekasi yang semula masyarakatnya banyak yang memproduksi batu bata merah, batako dan genteng sebagai mata pencaharian, karena kualitas tanahnya memadai untuk kegiatan usaha

tersebut

- tersebut mulai berkurang karena lahannya dipergunakan untuk perumahan atau industri;
- (2) hasil laut masih cukup tersedia di wilayah utara Jakarta, daerah kepulauan seribu, pesisir Tangerang dan Bekasi. Masyarakat setempat menjadikan hasil laut sebagai mata pencaharian. Hasil laut yang mempunyai nilai ekonomis antara lain: ikan laut, ikan tawar, udang dan rumput laut;
 - (3) kekayaan laut di wilayah utara Jakarta, pesisir Tangerang dan Bekasi masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, masih ada ditemukan masyarakat nelayan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga merusak ekologi laut, populasi laut dan kelestarian alam laut serta penebangan hutan bakau tanpa memperhatikan lingkungan dan merusak kehidupan ekosistem laut;
 - (4) usaha tambak ikan yang terdapat dipinggir laut antara Tangerang dan Bekasi di usahakan oleh warga Masyarakat dengan cara tradisional, sehingga hasil tambak tidak optimal, bahkan ada pemilik tambak yang menyewakan kepada orang lain, karena kesulitan pemodalan dan pemilik tambak menjadi pengelola tambak yang diupah oleh penyewa yang notabene bukan warga setempat;
 - (5) pertanian, perkebunan di wilayah Polda Metro Jaya dari waktu ke waktu semakin berkurang, sebab sebagian lahan pertanian di wilayah Tangerang, Bekasi dan Depok telah berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk, perumahan ataupun daerah industri, dan masyarakatnya pun mulai beralih menjadi pekerja pabrik;
 - (6) selain dari Air Tanah, sumber air di wilayah Jakarta berasal dari Bogor yang mengalir ke Jakarta melalui Sungai Ciliwung dan anak Sungai Ciliwung. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum setelah dilakukan penjernihan oleh PDAM yang saat ini dikelola dua perusahaan dari Perancis dan Inggris;
 - (7) aliran air sungai dari Bogor di samping sebagai bahan baku air minum warga DKI Jakarta juga menjadi salah satu penyumbang banjir di DKI Jakarta. Banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain

lain pola hidup warga masyarakat DKI Jakarta yang membuang sampah sembarangan, sistem *Drainase* yang kurang baik, penyempitan alur sungai serta kondisi tanah DKI Jakarta 40% berada di bawah permukaan laut, dan adanya proyek reklamasi.

- (8) Pada tahun 2018 terjadi air pasang yang mengakibatkan banjir pada daerah pesisir pantai Utara, hal tersebut tidak lepas dari “global warming” yang menjadi permasalahan dunia. Sementara jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada kelompok usia kerja. Mereka terpaksa mencari kerja di Jakarta karena di daerahnya tidak ada lagi perusahaan yang mampu bertahan dari persaingan global, pasca pelaksanaan perdagangan bebas China di ASEAN. Sementara Sumber Daya Alam akan semakin berkurang kualitasnya bersamaan dengan berubahnya beberapa lahan serapan air menjadi pemukiman.

d) Ideologi

- (1) Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia masih diterima oleh bangsa Indonesia, namun sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, muncul keinginan dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberal dan faham sosialis/komunis, cenderung masih akan terus berlanjut;
- (2) Kegiatan eks nabi politik yang memperjuangkan ideologinya seperti ideologi komunis masih terus dilakukan, beberapa tokoh muda ditenggarai sudah masuk dalam berbagai Parpol bahkan duduk menjadi fungsionaris, indikasi adanya upaya menghidupkan ideologi komunitas antara lain:
- (a) Hingga saat ini eks G 30 S PKI masih eksis memperjuangkan peninjauan status hukum mereka dengan meminta ganti rugi, disamping mereka tetap menuntut hak-haknya dalam bidang politik;

(b) Eks Nabi

- (b) Eks Napi G 30 S PKI membentuk organisasi yang secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas perjuangan mereka dibidang politik, ekonomi dan budaya.
- e) Sosial Budaya
- (1) DKI Jakarta dan sekitarnya termasuk Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi adalah daerah yang dikelilingi oleh industri, sehingga timbul berbagai masalah sosial antara lain : Pemukiman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, tenaga kerja yang didominasi pendatang, pendatang tanpa keterampilan yang memadai, lingkungan yang kumuh, kesemerawutan berlalulintas dan pencemaran lingkungan;
 - (2) masih ada dokumen kepemilikan tanah yang tumpang tindih, proses hukum yang lambat terhadap kepastian hukum terhadap tanah tersebut telah menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa menempatkan kelompok etnis tertentu sebagai penjaga lahan kosong dan sering memicu terjadinya bentrokan antar kelompok etnis/premanisme/Ormas terkait dengan penguasaan tanah sengketa;
 - (3) penertiban bangunan liar untuk kepentingan pembangunan, sering menimbulkan perlawanan didorong beberapa faktor antara lain: harga ganti rugi tidak cukup untuk membeli tanah di tempat lain; warga enggan pindah karena dekat dengan tempat kerja dan sekolah anak serta sudah cukup lama mendiami tempat tersebut; maupun kurangnya sosialisasi program pembangunan dari pemerintahan setempat; warga merasa tidak diajak musyawarah serta adanya campur tangan/*Back Up* oleh Ormas/LSM kepada warga;
 - (4) Masih adanya dokumen kepemilikan tanah yang tumpang tindih, proses hukum yang lambat terhadap kepastian hukum terhadap tanah tersebut telah menyebabkan pihak – pihak yang bersengketa menempatkan kelompok etnis tertentu sebagai penjaga lahan kosong dan sering memicu terjadinya bentrokan antar kelompok etnis / premanisme terkait dengan penguasaan tanah sengketa;
 - (5) Masalah perburuhan masih akan bergulir setiap tahun karena akan selalu ada issue-issue baru yang digunakan oleh para buruh untuk

tema aksi unjuk rasa terutama Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektor Propinsi (UMSP), Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);

- (6) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat berimplikasi terhadap terjadinya berbagai bentuk bencana alam seperti banjir dan kebakaran;
- (7) Permasalahan Korupsi di instansi pemerintah baik di Jakarta maupun diluar Jakarta masih menjadi daya tarik bagi kelompok-kelompok massa, Ormas/LSM/Mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPK, depan Istana Negara.

f) Keamanan

- (1) Kesiapan pihak keamanan terkait beroperasinya sarana transportasi masal terintegrasi yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti :
 - (a) pembangunan sarana kereta cepat Jakarta Bandung yang dilaksanakan tanpa menggunakan APBN oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (60% PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan 40% China Railway Internasional);
 - (b) pembangunan MRT/*Mass Rapid Transit* yang sebagian jalur maupun stasiunnya berada di bawah tanah (*Underground*) diperkirakan dapat mengurangi 30% kemacetan;
 - (c) pembangunan LRT (Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* dan Perpres Nomor 99/2015 tentang percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta);
 - (d) operasional kereta Cikarang - Jakarta maupun KRL (*Commuter Line*);
- (2) Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa, dan cenderung

dalam.

dalam menangani masalah keamanan masyarakat bertindak main hakim sendiri;

- (3) Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan di bidang politik, sosial ekonomi masyarakat maupun kondisi sosial budaya;
- (4) ketidakpedulian atau masih rendahnya partisipasi warga Ibukota dan masyarakat sekitar Jakarta dalam mengamankan diri, dan lingkungannya serta menganggap bahwa masalah keamanan cukup menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja;
- (5) pemahaman masyarakat Ibukota yang masih rendah terhadap hukum dan kurangnya kepatuhan serta disiplin terhadap hukum sehingga meninggalkan norma dan kaidah hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum, seperti timbulnya anarkisme dan kasus main hakim sendiri;
- (6) timbulnya korban jiwa dan materil sehingga diperlukan penanganan secara intensif, transparan agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- (7) potensi kerawanan penyebaran paham radikalisme maupun terorisme seperti ISIS melalui sarana media massa baik cetak maupun elektronik dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban di Ibukota;
- (8) permasalahan yang berlatar belakang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan;
- (9) lemahnya penjagaan pintu-pintu masuk ke wilayah Jakarta dan sekitarnya yang dapat tumbuhnya kejahatan transnasional seperti peredaran Narkoba, terorisme, penyelundupan dan lain-lain.

5) Daerah Kota Tangerang dan sekitarnya

a) Geografi

- (1) daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota meliputi wilayah Kota Tangerang dan sebagian Wilayah Kabupaten Tangerang serta Bandara Sukarno Hatta.;

(2) Posisi

- (2) Posisi wilayah Kota Tangerang memiliki karakteristik yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang serta Bandara Sukarno Hatta, pada waktu-waktu tertentu apabila ada kegiatan pertandingan Bola di wilayah Kabupaten Tangerang maka Polres Metro Tangerang Kota melaksanakan penyekatan pemberangkatan suporter sehingga tidak terjadi gangguan Kamtibmas.;
 - (3) wilayah Polres Mero Tangerang Kota merupakan wilayah pusat Pemerintahan Daerah Kota Tangerang, pusat perekonomian, pusat perindustrian, pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Situasi dan kondisi tersebut Kota Tangerang menjadi kota tempat bertemunya berbagai bangsa dengan berbagai latar belakang kepentingan, budaya juga berbagai suku dan agama;
 - (4) kondisi masyarakat heterogen baik dari segi sosial budaya, sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang merata, merupakan potensi timbulnya kerawanan/konflik antar kelompok dan kepentingan yang dapat mengganggu Kamtibmas. Dalam persaingan antar kelompok mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan;
 - (5) letak geografi Kota Tangerang yang strategis sebagai pintu masuk ke Bandara Internasional Sukarno Hatta berbagai hal dari luar negeri sehingga sebagai etalase bagi masyarakat internasional berbagai permasalahan keamanan muncul seperti keimigrasian dan penyelundupan orang, barang dan Narkoba.
- b) Demografi
- (1) sebagai pusat pemerintahan Daerah, maka Kota Tangerang menjadi sasaran, dan tujuan kedatangan masyarakat dari seluruh Indonesia dengan berbagai harapan, sehingga berbagai suku dari seluruh Indonesia terdapat di kota Tangerang, sedangkan Warga Betawi sebagai penduduk asli sudah mulai tergusur keberadaannya. Di samping penduduk Indonesia asli, di Kota Tangerang tidak sulit untuk menemukan warga negara asing dari berbagai negara di dunia, hal tersebut tidak terlepas dari posisi Kota Tangerang sebagai pintu gerbang menuju Bandara Internasional Sokarno Hatta;

(2) dengan

- (2) dengan jumlah penduduk yang besar di samping sebagai modal dasar pembangunan juga mengandung kerawanan dengan dimensi kerawanan yang luas dan kompleks. Hal tersebut disebabkan masih belum berimbangnya laju penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia dan sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut adalah tingginya angka pengangguran di Tangerang.
- (9) Sumber Daya Alam Penambangan pasir masih dapat ditemukan di wilayah Tangerang. Pada umumnya penambangan pasir masih dilakukan secara tradisional dan di jual sebagai bahan bangunan. Sementara di beberapa daerah yang semula masyarakatnya banyak yang memproduksi batu bata merah, batako dan genteng sebagai mata pencaharian, karena kualitas tanahnya memadai untuk kegiatan usaha tersebut mulai berkurang karena lahannya dipergunakan untuk perumahan atau industri;
- (10) hasil laut masih cukup tersedia di wilayah utara Tangerang, Masyarakat setempat menjadikan hasil laut sebagai mata pencaharian. Hasil laut yang mempunyai nilai ekonomis antara lain: ikan laut, ikan tawar, udang dan rumput laut;
- (11) kekayaan laut di wilayah utara Tangerang masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, masih ada ditemukan masyarakat nelayan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga merusak ekologi laut, populasi laut dan kelestarian alam laut serta penebangan hutan bakau tanpa memperhatikan lingkungan dan merusak kehidupan ekosistem laut;
- (12) usaha tambak ikan yang terdapat dipinggir laut di usahakan oleh warga Masyarakat dengan cara tradisional, sehingga hasil tambak tidak optimal, bahkan ada pemilik tambak yang menyewakan kepada orang lain, karena kesulitan pemodal dan pemilik tambak menjadi pengelola tambak yang diupah oleh penyewa yang notabene bukan warga setempat;
- (13) pertanian, perkebunan di wilayah Kota Tangerang dari waktu ke waktu semakin berkurang, sebab sebagian lahan pertanian di wilayah Kota

Tangerang telah berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk, perumahan ataupun daerah industri, dan masyarakatnya pun mulai beralih menjadi pekerja pabrik;

- (14) selain dari Air Tanah, sumber air di wilayah Tangerang berasal dari Sungai Cisadane Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum setelah dilakukan penjernihan oleh PDAM yang saat ini dikelola oleh perusahaan Minum;

c) Ideologi

- (1) Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia masih diterima oleh bangsa Indonesia, namun sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, muncul keinginan dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberal dan faham sosialis/komunis, cenderung masih akan terus berlanjut;
- (2) Kegiatan eks nabi politik yang memperjuangkan ideologinya seperti ideologi komunis masih terus dilakukan, beberapa tokoh muda ditenggarai sudah masuk dalam berbagai Parpol bahkan duduk menjadi fungsionaris, indikasi adanya upaya menghidupkan ideologi komunitas antara lain:
- (a) Hingga saat ini eks G 30 S PKI masih eksis memperjuangkan peninjauan status hukum mereka dengan meminta ganti rugi, disamping mereka tetap menuntut hak-haknya dalam bidang politik;
- (b) Eks Napi G 30 S PKI membentuk organisasi yang secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas perjuangan mereka dibidang politik, ekonomi dan budaya.

d) Sosial Budaya

- (1) Kota Tangerang dan sekitarnya adalah daerah yang dikelilingi oleh industri, sehingga timbul berbagai masalah sosial antara lain : Pemukiman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, tenaga kerja yang

didominasi

- didominasi pendatang, pendatang tanpa keterampilan yang memadai, lingkungan yang kumuh, kesemerawutan berlalulintas dan pencemaran lingkungan;
- (2) masih ada dokumen kepemilikan tanah yang tumpang tindih, proses hukum yang lambat terhadap kepastian hukum terhadap tanah tersebut telah menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa menempatkan kelompok etnis tertentu sebagai penjaga lahan kosong dan sering memicu terjadinya bentrokan antar kelompok etnis/premanisme/Ormas terkait dengan penguasaan tanah sengketa;
 - (3) penertiban bangunan liar untuk kepentingan pembangunan, sering menimbulkan perlawanan didorong beberapa faktor antara lain: harga ganti rugi tidak cukup untuk membeli tanah di tempat lain; warga enggan pindah karena dekat dengan tempat kerja dan sekolah anak serta sudah cukup lama mendiami tempat tersebut; maupun kurangnya sosialisasi program pembangunan dari pemerintahan setempat; warga merasa tidak diajak musyawarah serta adanya campur tangan/*Back Up* oleh Ormas/LSM kepada warga; oleh
 - (4) Masih adanya dokumen kepemilikan tanah yang tumpang tindih, proses hukum yang lambat terhadap kepastian hukum terhadap tanah tersebut telah menyebabkan pihak – pihak yang bersengketa menempatkan kelompok etnis tertentu sebagai penjaga lahan kosong dan sering memicu terjadinya bentrokan antar kelompok etnis / premanisme terkait dengan penguasaan tanah sengketa;
 - (5) Masalah perburuhan masih akan bergulir setiap tahun karena akan selalu ada issue-issue baru yang digunakan oleh para buruh untuk tema aksi unjuk rasa terutama Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP), Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
 - (6) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat berimplikasi terhadap terjadinya berbagai bentuk bencana alam seperti banjir dan kebakaran;
 - (7) Permasalahan Korupsi di instansi pemerintah baik di Jakarta maupun

diluar.....

diluar Jakarta masih menjadi daya tarik bagi kelompok-kelompok massa, Ormas/LSM/Mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPK, depan Istana Negara.

e) Keamanan

- (1) Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa, dan cenderung dalam menangani masalah keamanan masyarakat bertindak main hakim sendiri;
- (2) Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan di bidang politik, sosial ekonomi masyarakat maupun kondisi sosial budaya;
- (3) ketidakpedulian atau masih rendahnya partisipasi warga Kota Tangerang dan masyarakat sekitar Tangerang dalam mengamankan diri, dan lingkungannya serta menganggap bahwa masalah keamanan cukup menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja;
- (4) pemahaman masyarakat Kota Tangerang yang masih rendah terhadap hukum dan kurangnya kepatuhan serta disiplin terhadap hukum sehingga meninggalkan norma dan kaidah hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum, seperti timbulnya anarkisme dan kasus main hakim sendiri;
- (5) timbulnya korban jiwa dan materil sehingga diperlukan penanganan secara intensif, transparan agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- (6) potensi kerawanan penyebaran paham radikalisme maupun terorisme seperti ISIS melalui sarana media massa baik cetak maupun elektronik dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban di Ibukota;
- (7) permasalahan yang berlatar belakang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan;
- (8) lemahnya penjagaan pintu-pintu masuk ke wilayah Jakarta dan sekitarnya yang dapat tumbuhnya kejahatan transnasional seperti peredaran Narkoba, terorisme, penyelundupan dan lain-lain.

b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Polres Metro Tangerang Kota, dapat dianalisa dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu:

1) Kekuatan

- a) personel Polres Metro Tangerang Kota sebanyak 1.514 orang terdiri dari Polri 1.477 orang dengan kepangkatan Pamen 41 orang, Pama 176 orang, Bintara 1.260 orang. Sedangkan ASN 67 orang terdiri dari Gol. IV 1 orang, Gol. III 26 orang, Gol. II 37 orang, Gol. I 1 orang;
- b) gelar kekuatan dan lapis kemampuan Polres Metro Tangerang Kota telah tergelar mulai tingkat pusat sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Hal tersebut menggambarkan postur kekuatan Polri yaitu Mabes Polri sebagai penanggung jawab keamanan, Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayanan masyarakat;
- c) adanya dukungan sarana dan prasarana Polres Metro Tangerang Kota yang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis) tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri;
- d) meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional Kepolisian yang dengan sistem desentralisasi telah terdistribusi sampai ke tingkat Polsek (Satker) dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker sejak awal tahun anggaran berjalan;
- e) peningkatan kemampuan fungsi operasional dalam berbagai capaian penanganan kejahatan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Metro Tangerang Kota.

2) Kelemahan

2) Kelemahan

- a) masih rendahnya kemampuan dan keterampilan anggota Polres Metro Tangerang Kota di lapangan terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi dan biokimia di bidang kriminalitas yang modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih serta masih tingginya proses birokrasi dalam penyelesaian perkara;
- b) reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Polri Polres Metro Tangerang Kota yang menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan Polres Metro Tangerang Kota;
- c) dukungan anggaran belum menunjukkan keseimbangan antara belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dalam memenuhi kebutuhan anggaran Polres Metro Tangerang Kota sehingga kurang memprioritaskan dukungan kegiatan operasional Kepolisian dan belum memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas, materil dan kesejahteraan personel akibatnya masih terjadi penyalahgunaan wewenang;
- d) masih terbatasnya penyidik Polri Polres Metro Tangerang Kota yang berlatar belakang pendidikan S1 atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kompetensi/kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *Cyber Crime*, *Money Loundring*, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

3) Peluang

- a) keberlanjutan program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), memberikan peluang bagi Polres Metro Tangerang Kota untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural;

b) dukungan

- b) dukungan dari Legislatif (Komisi III DPR-RI), Eksekutif (Menkeu) dan Bappenas dalam upaya meningkatkan anggaran Polres Metro Tangerang Kota dari tahun ke tahun;
 - c) tugas operasional Polri dalam menciptakan keamanan dalam negeri melalui penggelaran Bhabinkamtibmas dengan menerapkan strategi Polmas semakin meningkat, hal ini menjadi peluang bagi Polres Metro Tangerang Kota dalam membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*);
 - d) meningkatnya intensitas hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait (*Partnership*) baik dalam negeri maupun luar negeri guna mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif;
 - e) kebijakan pemerintah tentang penerimaan personel dengan pendekatan *Minimal Zero Growth* untuk mengimbangi proporsional anggaran Polres Metro Tangerang Kota belanja pegawai 76%, dan belanja barang 24%
- 4) Ancaman
- a) trend peningkatan empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi Polres Metro Tangerang Kota untuk meningkatkan kinerja di bidang pencegahan dan penegakan hukum;
 - b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di samping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam mengembangkan modus kejahatan;
 - c) tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri;
 - d) sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam penerapan penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan;
 - e) aplikasi media sosial sangat akrab dengan warga Ibukota, namun masih banyak informasi-informasi yang salah atau tidak benar (*Hoax*) yang beredar

memungkinkan

memungkinkan menimbulkan suatu permasalahan/perpecahan di masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

Menghadapi tantangan sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis baik wilayah Jakarta, regional maupun global penanganannya memerlukan profesionalisme Polri, dan pada tahun mendatang tidaklah semakin ringan. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang keamanan. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan dalam negeri, sehingga perlu langkah-langkah konkret Polres Metro Tangerang Kota dalam pelaksanaan pelayanan Kamtibmas prima melalui lembaga yang solid dan efektif. Secara umum permasalahan yang diperkirakan dijumpai, yaitu:

a. Bidang Ideologi

- 1) Masih ada upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pendahulu kita. Antara lain keinginan menjadikan Indonesia menjadi negara dengan bentuk kekhalifahan serta berlandaskan hukum Islam. Kelompok ini cukup agresif dalam mengkampanyekan bentuk negara kekhalifahan.
- 2) Masih eksis upaya membangkitkan ideologi komunis dimana mereka justru merekrut kalangan muda/mahasiswa. Komunitas ini banyak bermunculan di kampus-kampus dengan melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dengan cover kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 3) Perkembangan dukungan masyarakat Indonesia terhadap ISIS semakin bertambah sehingga banyak warga negara Indonesia yang turut berjuang ke luar negeri di suriah.

b. Bidang Politik

- 1) Pasca Pilkada Serentak 2018, masih ada tumbuh rasa kecewa dari kelompok yang kalah sehingga berpotensi menimbulkan konflik yang dikemas dalam bentuk unras mensikapi hasil kerja pejabat yang terpilih;

2). Adanya

- 2) Adanya pejabat terpilih yang terlibat kasus korupsi, dan tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK;
- 3) Dalam implementasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Mahasiswa/Ormas/LSM/kelompok masyarakat lainnya, terdapat kecenderungan pelaksanaan unjuk rasa yang tidak terkendali/ kebablasan/ melanggar hukum, bahkan disertai dengan tindakan anarkis, seperti :
 - (a) Mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - (b) Merusak fasilitas umum/milik Negara;
 - (c) Menghina Presiden/pejabat tertentu/lambang negara tertentu, dll;
 - (d) Melakukan fitnah;
 - (e) Merusak rumah/kendaraan/barang milik orang lain;
 - (f) Menyerang petugas/aparat keamanan.

c. Bidang Ekonomi

- 1) melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar yang akan mengakibatkan lesunya perekonomian;
- 2) Pertambahan jumlah kendaraan motor yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana jalan berakibat kepada timbulnya berbagai masalah lalu lintas khususnya di kota besar seperti kemacetan, kesemrawutan lalulintas, kecelakaan, dsb;
- 3) Permasalahan transportasi online yang masih terus berlanjut terkait Regulasi, dengan cara melakukan unjuk rasa di depan istana Negara maupun kantor aplikasi.

d. Bidang Sosial Budaya

Konflik horizontal dan vertikal di beberapa daerah yang dilatarbelakangi masalah perburuhan (UMP dan PHK sepihak), penolakan terhadap rumah/tempat yang digunakan untuk ibadah, SARA, pertanahan dan perkebunan masih akan mewarnai situasi keamanan dalam negeri.

e. Bidang Keamanan

- 1) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan;

2). Masih

- 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengamankan diri dan lingkungannya yang menganggap bahwa masalah keamanan adalah hanya tanggung jawab aparat keamanan;
- 3) Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan masyarakat bertindak main hakim sendiri;
- 4) Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan di bidang politik, sosial ekonomi masyarakat maupun kondisi sosial budaya.

II. Tujuan dan Sasaran

3. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polda Metro Jaya

- 1) Visi
terwujudnya profinsi yang aman dan tertib.
- 2) Misi
melindungi melayani dan mengayomi masyarakat.

b. Visi dan Misi Polres Metro Tangerang Kota

- 1) Visi
Terwujudnya Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota yang aman dan tertib
- 2) Misi
melindungi melayani dan mengayomi masyarakat.

4. Tujuan Jangka Menengah

a. Polda Metro Jaya

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Polda Metro Jaya;
- 2) menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
- 3) modernisasi pelayanan Polri;
- 4) mewujudkan polri yang professional;
- 5) menerapkan manajemen polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Polres Metro Tangerang Kota

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Polres Metro Tangerang Kota;
- 2) menegakkan

- 2) menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
- 3) modernisasi pelayanan Polri;
- 4) mewujudkan polri yang profesional;
- 5) menerapkan manajemen polri yang terintegrasi dan terpercaya.

5 Sasaran Prioritas

a. Polda Metro Jaya

Sasaran Prioritas Polri dan Polda Metro Jaya yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2012/21 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pertama** "Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis dan bermartabat";
- 2) **Kedua** "Pelayanan Publik Polda Metro Jaya yang Prima berbasis TIK";
- 3) **Ketiga** "Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya";
- 4) **Keempat** "Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Metro Jaya yang sesuai standar ";
- 5) **Kelima** "Modernisasi teknologi Alpakam dan Almatsus Polda Metro Jaya secara bertahap dari tingkat Polda sampai dengan Polsubsektor";
- 6) **Keenam** "Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya".

b. Polres Metro Tangerang Kota

- 1) **Pertama** "Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis dan bermartabat";
- 2) **Kedua** "Pelayanan Publik Polres Metro Tangerang Kota yang Prima berbasis TIK";
- 3) **Ketiga** "Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya";
- 4) **Keempat** "Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Metro Tangerang Kota yang sesuai standar ";
- 5) **Kelima** "Modernisasi teknologi Alpakam dan Almatsus Polres Metro Tangerang Kota secara bertahap dari tingkat Polres sampai dengan Polsubsektor";
- 6) **Keenam** "Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya".

III. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2021

6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Metro Jaya Tahun 2021

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Metro Jaya Tahun 2021 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Harkamtibmas yang humanis dan bermartabat**”, yaitu:

1) penguatan peran Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan daerah melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan, agar mampu memberikan informasi berkualitas; saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi yang memadai. (giat 3112,3114,3115,3116,3117, 3150/prog7SP1/SS1/IKU1/prom3)

2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme di wilayahan hukum Polda Metro Jaya.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1);

b) meningkatkan kemampuan penanganan sapatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif; Turjawali (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8,11);

c) meningkatkan kemampuan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi Binmas (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKU1/prom8);

d) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasila untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);

e) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);

f) identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);

3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);
 - b) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam mendampingi mantan pecandu Narkoba yang telah direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);
- 4) mewujudkan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melaksanakan sosialisasi budaya tertib lalu lintas;
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1prom8);
- 5) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergitas polisonal;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyiapkan personel Polda Metro Jaya untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi;(giat3130/prog10/SP7/SS1/IKP1/prom7);
 - b) membentuk system rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; (giat5087/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;
(giat5087/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7);
- 6) peningkatan kerja sama dalam/luar negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
inventarisasi MoU Polda Metro Jaya dengan K/L, Pemda dan Stakeholder lainnya dalam rangka memperbaharui kerjasama yang habis masa berlakunya;
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/PROM7)
- 7) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: patroli kapal Polri diseluruh wilayah perairan Polda Metro Jaya dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP3/prom7);

b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ **Pelayanan Publik Polri yang Prima Berbasis TIK**”, yaitu:

- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK; (giat3071/prog1/SP2/SS2/IKP3/prom2);
- 2) peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyusun standar operasi prosedur untuk pelayanan PNBP fungsi Binmas; (giat5076/prog9/SP2/SS1/IKP2/prom8,11);
 - b) melaksanakan pelatihan revolusi mental; (giat3100/prog5/SP2/SS4/IKP1/prom11);
 - c) melaksanakan pembangunan BPKB dan STNK online; (giat3133/prog10/SP2/SS1/IKP2/prom2,11);
- 3) pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA);
 - b) pengembangan SPKT berbasis TIK dengan menggunakan system EMP; (giat3142/prog11/SP2/SS3/IKP3/prom9);
- 4) pengelolaan quick response Kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan tindak kejahatan; (giat5053/prog1/SP2/SS2/IKP2/prom6).

c. arah

- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ **Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya**”, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;
(giat3142,3144,3145,3146,5083/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);
 - b) peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala nasional, di wilayah hukum Polda Metro Jaya .
(giat3144/prog11/SP3/SS3/IKU3/prom9).
 - 2) peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat5052/prog1/SP7/SS1/IKP3/prom6);
 - 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
peningkatan pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawas penyidik untuk mengontrol proses penyidikan.
(giat5086/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ **Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri yang sesuai Standar**”, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas 8 standar pendidikan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
menyusun standar kompetensi lulusan sesuai jenis dan jenjang pendidikan (Diktu,Dikbangum, dan Dikbangspes); (giat3100/prog5/SP4/SS4/IKP5/prom1);
 - 2) penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polda Metro Jaya;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melaksanakan

- a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban kerja dan HTCK pada satker jajaran Polda Metro Jaya;
(giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP12/prom6);
- b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja; (giat5052/prog1/SP4/SS7/IKP12/prom6);
- 3) pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbang dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan aplikasi secara online;
(giat 3107/prog6/SP4/SS4/IKP5/prom1, 11);
 - b) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam pembinaan karier personal secara meryt system;
(giat 3107/prog6/SP4/SS4/IKP5/prom1);
- 4) penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi; melalui e-planning, e-budgeting dan e-procurement;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
 - a) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi kepolisian;
(giat3100/prog5/SP4/SS4/IKP4/prom1);
 - b) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka;
(giat3108/prog1/SP7/SS1/IKP3/prom6);
- 5) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja online
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
 - a) melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian SMK Online;
(giat3108/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom6);
 - b) meningkatkan prosentase pengisian SMK Online sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karier personel;
(giat3108/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom6);
 - c) pengembangan peralatan SIPP untuk mendukung terlaksananya pengisian SMK Online; (giat3108/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom6);

6) peningkatan....

- 6) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
- a) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik di Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan secara paripurna kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum; (giat3072/prog1/SP4/SS4/IKP5/prom5);
 - b) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta ketrampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri; (giat3072/prog1/SP4/SS4/IKP5/prom5);
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ **Modernisasi Teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri secara Bertahap dari Tingkat Polda Metro Jaya sampai dengan Polsubsektor**”, yaitu:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
- 1) pengusulan pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah Polda Metro Jaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
 - a) menyusun Renbut fasilitas Perkantoran dan Rumdin di jajaran Polda Metro Jaya;(giat 5062/prog2/SP5/SS5/IKP9/prom4)
 - b) melaksanakan pembangunan fasilitas Perkantoran dan Rumdin di jajaran Polda Metro Jaya;(giat 5062/prog2/SP5/SS5/IKP9/prom4);
 - 2) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polda Metro Jaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
 - a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Metro Jaya; (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP10/prom4);
 - b) melaksanakan evaluasi terhadap Alpalkam dan Almatsus Polda Metro Jaya; (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP10IKP4/prom4);
 - c) menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polda Metro Jaya; (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP10/prom4);
 - 3) pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan menyusun Renbut fasilitas Perkantoran dan Rumdin di jajaran Polda Metro Jaya;(giat 5062/prog2/SP5/SS5/IKP9/prom4)

4). Pengembangan....

- 4) pengembangan Almatsus SCI;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan meningkatkan sarana dan prasarana lidik sidik serta Bantek yang memenuhi Standar Investigasi tindak pidana secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI);
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP9/prom4);
 - 5) modernisasi Sarpras Binmas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan menyusun standar pembangunan pos kamling modern;
(giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP9/prom4);
 - 6) pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan pembangunan Almatsus Siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana;
(giat5062/prog2/SP5/SS1/IKP10/prom4);
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan terpercaya”, yaitu:
- 1) penanganan publik complain secara efektif dan terpercaya;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat;
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);
 - b) penerapan system penanganan pengaduan masyarakat secara online;
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);
 - c) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir complain dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat5089/prog11/SP6/SS9/IKP19/prom10);
 - d) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atas penyidik dan Wasdik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
(giat5089/prog11/SP6/SS9/IKP19/prom10);
 - 2) penguatan Saber Pungli;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pembangunan.....

pembangunan system pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan tingkat Polda Metro Jaya;

(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP13/prom10,11);

3) pencegahan Korupsi di internal Polda Metro Jaya;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;

(giat3088/prog3/SP7/SS9/IKP19/prom6,11);

b) peningkatan layanan kontak pengaduanmasyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian;

(giat3088/prog3/SP7/SS9/IKP19/prom6,11);

4) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan di jajaran Polda Metro Jaya;

(giat5052/prog1/SP7/SS7/IKP15/prom6);

5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polda Metro Jaya;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

(giat5053/prog1/SP7/SS7/IKP14/prom6);

b) pengukuran kinerja Polri dengan Indeks Tata Kelola Polri;

(giat5053/prog1/SP7/SS7/IKP15/prom6);

c) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;

(giat5053/prog1/SP7/SS7/IKP15/prom6);

7. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Metro Tangerang Kota Tahun 2021

Selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Polda Metro Jaya Tahun 2021, maka dalam mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polres Metro Tangerang Kota Tahun 2021, maka

ditetapkan.....

ditetapkanlah Arah Kebijakan dan Strategi Polres Metro Tangerang Kota Tahun 2021 sebagai berikut :

a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ **Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis dan bermartabat**”, yaitu:

1) penguatan peran Polres Metro Tangerang Kota dalam menjaga keamanan daerah melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan, agar mampu memberikan informasi berkualitas; saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi yang memadai. (giat 3112,3114,3115,3116,3117, 3150/prog7SP1/SS1/IKU1/prom3)

2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme di wilayahan hukum Polres Metro Tangerang Kota.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1);

b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif; Turjawali (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8,11);

c) meningkatkan kemampuan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungus Binmas (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKU1/prom8);

d) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);

e) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);

f) identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);

3) meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);

b) meningkatkan

- b) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam mendampingi mantan pecandu Narkoba yang telah direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa; (giat5076/prog9/SP1/SS1.IKP1/prom8);
 - 4) mewujudkan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melaksanakan sosialisasi budaya tertib lalu lintas;
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1prom8);
 - 5) penyelenggaraan operasional dan back up kewilayahan personel Polres Metro Tangerang Kota dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan menjalin sinergitas polisonal;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyiapkan personel Polres Metro Tangerang Kota untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi;(giat3130/prog10/SP7/SS1/IKP1/prom7);
 - b) membentuk system rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; (giat5087/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;
(giat5087/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7);
 - 6) peningkatan kerja sama dalam negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
inventarisasi MoU Polres Metro Tangerang Kota dengan Pemda dan Stakeholder lainnya dalam rangka memperbaharui kerjasama yang habis masa berlakunya;
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/PROM7)
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ **Pelayanan Publik Polri yang Prima Berbasis TIK**”, yaitu:
- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;
(giat3071/prog1/SP2/SS2/IKP3/prom2);

- 2) peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyusun standar operasi prosedur untuk pelayanan PNBP fungsi Binmas;
(giat5076/prog9/SP2/SS1/IKP2/prom8,11);
 - b) melaksanakan pelatihan revolusi mental;
(giat3100/prog5/SP2/SS4/IKP1/prom11);
 - c) melaksanakan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat3133/prog10/SP2/SS1/IKP2/prom2,11);
 - 3) pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA);
 - b) pengembangan SPKT berbasis TIK dengan menggunakan system EMP;
(giat3142/prog11/SP2/SS3/IKP3/prom9);
 - 4) pengelolaan quick response Kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan tindak kejahatan;
(giat5053/prog1/SP2/SS2/IKP2/prom6).
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ **Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya**”, yaitu:
- 4) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - c) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;
(giat3142,3144,3145,3146,5083/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);
 - d) peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala nasional, di wilayah hukum Polda Metro Jaya .
(giat3144/prog11/SP3/SS3/IKU3/prom9).

5) peningkatan

- 5) peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat5052/prog1/SP7/SS1/IKP3/prom6);
 - 6) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
peningkatan pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawas penyidik untuk mengontrol proses penyidikan.
(giat5086/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ **Modernisasi Teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri secara Bertahap dari Tingkat Polres sampai dengan Polsubsektor**”, yaitu:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
- 1) pengusulan pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah Polres Metro Tangerang Kota;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan menyusun Renbut fasilitas Perkantoran dan Rumdin di jajaran Polres Metro Tangerang Kota;(giat 5062/prog2/SP5/SS5/IKP9/prom4)
 - 2) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polres Metro Tangerang Kota;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
 - a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polres Metro Tangerang Kota;
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP10/prom4);
 - b) melaksanakan evaluasi terhadap Alpalkam dan Almatsus melaksanakan pembangunan fasilitas Perkantoran dan Rumdin di jajaran Polres Metro Tangerang Kota;(giat 5062/prog2/SP5/SS5/IKP9/prom4);
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP10Ikp4/prom4);
 - c). menyusun.....

- c) menyusun kebutuhan minimal Alpkam dan Almatsus b) melaksanakan pembangunan fasilitas Perkantoran dan Rumdin di jajaran Polres Metro Tangerang Kota;(giat 5062/prog2/SP5/SS5/IKP9/prom4);
 (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP10/prom4);
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan terpercaya”**, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat;
 (giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);
 - b) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir complain dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
 (giat5089/prog11/SP6/SS9/IKP19/prom10);
 - d) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atas penyidik dan Wasdik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
 (giat5089/prog11/SP6/SS9/IKP19/prom10);
 - 2) penguatan Saber Pungli;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 pembangunan system pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres Metro Tangerang Kota;
 (giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP13/prom10,11);
 - 3) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif dan efisien;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan di jajaran Polres Metro Tangerang Kota;
 (giat5052/prog1/SP7/SS7/IKP15/prom6);
 - 4) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polres Metro Tangerang Kota;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a). penilaian.....

- a) penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
(giat5053/prog1/SP7/SS7/IKP14/prom6);
- b) pengukuran kinerja Polri dengan Indeks Tata Kelola Polri;
(giat5053/prog1/SP7/SS7/IKP15/prom6);
- c) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
(giat5053/prog1/SP7/SS7/IKP15/prom6);

IV. Program, Kegiatan dan Rencana Kebutuhan Indikatif T.A. 2021

8. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri

1) Tujuan

Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta integrasi lintas sektoral.

2) Kegiatan

- a) penerangan masyarakat;
- b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- c) penyelenggaraan pengamanan internal Polri
- d) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan
- e) penyuluhan hukum;
- f) manajemen anggaran;

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

1) Tujuan

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi almatsus dan sarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan :

dukungan manajemen dan teknis Sarpras;

c. Program.....

- c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 1) Tujuan
Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi *Preemtif* dan *Preventif*.
 - 2) Kegiatan
 - a) dukungan manajemen dan Teknis Harkamtibmas;
 - b) analisa keamanan;
 - c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
 - d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
 - e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosbud;
 - f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
 - g) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
 - h) Penyelenggaraan Pam objek Vital;
 - i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
 - j) pembinaan potensi keamanan.
- d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- 1) Tujuan
Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi HAM.
 - 2) Kegiatan
 - a) penindakan Tindak Pidana Umum
 - b) penindakan Tindak Pidana Narkoba;
 - c) penindakan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) penindakan Tindak Pidana laka lantas;
9. Usulan Pagu Indikatif Polres Metro Tangerang Kota T.A. 2021
- a. Usulan kebutuhan anggaran Polres Metro Tangerang Kota T.A. 2020 sebesar Rp. 165.618.448.000,-, Sedangkan untuk Pagu Indikatif TA. 2021 mengalami kenaikan

sejumlah

sejumlah Rp 4.005.346.000,- atau naik 24.18% sebesar Rp 169.623.794.000,-, (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) rincian usulan Pagu Indikatif Polres Metroi Tangerang Kota T.A 2021 per jenis belanja sebagai berikut :
 - a) Belanja Pegawai Rp 133.204.662.000,-
 - b) Belanja Barang Rp 36.419.132.000,-
- 2) rincian usulan Pagu Indikatif T.A 2021 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - a) Rupiah Murni Rp 164.801.196.000,-
 - b) PNBP Rp 4.822.598.000,-
- 3) rincian usulan Pagu Indikatif T.A 2021 per program sebagai berikut:
 - a) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri sebesar Rp. 135.557.827.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - 1) penerangan masyarakat sebesar Rp. 234.633.000,-;
 - 2) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp. 135.176.722.000;
 - 3) penyelenggaraan pengamanan internal Polri Rp 67.472.000,-
 - 4) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp 44.000.000,-
 - 5) penyuluhan hukum Rp 25.000.000,-
 - 6) manajemen anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - b) program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri sebesar Rp 10.237.741.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
dukungan manajemen dan teknik Sarpras sebesar Rp. 10.237.741.000,-
 - c) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp. 11.754.750.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - 1) dukungan manajemen dan teknis Harkamtibmas Rp. 3.248.727.000,-;
 - 2) analisa keamanan Rp 331.370.000,-;
 - 3) penyelenggaraan strakamtib bidang politik Rp. 448.241.000,-;
 - 4) penyelenggaraan strakamtib bidang ekonomi Rp.350.768.000,-;
 - 5) penyelenggaraan strakamtib bidang sosial budaya Rp 423.241.000,-
 - 6) penyelenggaraan strakamtib bidang kamneg Rp 394.138.000,-
 - 7) Pembinaan fungsi Sabhara Rp 1.687.010.000,-
 - 8) penyelenggaraan pengamanan obyek vital sebesar Rp. 19.200.000,-;
 - 9) peningkatan.....

- 9) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas sebesar Rp. 1.445.440.000,-;
- 10) pembinaan potensi keamanan Rp 3.406.615.000,-
- d) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp. 12.037.476.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - 1) penindakan Tindak Pidana Laka Lantas Rp 293.500.000,-
 - 2) penindakan Tindak Pidana Umum Rp. 8.913.438.000,-;
 - 3) penindakan Tindak Pidana Narkoba Rp. 2.670.538.000,-;
 - 4) penindakan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 160.000.000,-;

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Polres Metro Tangerang Kota T.A. 2021 berdasarkan alokasi Pagu Indikatif Polres Metro Tangerang Kota T.A. 2021 disusun sebagai bahan masukan penyusunan Kerja di lingkungan Polres Metro Tangerang Kota T.A. 2021.

Ditetapkan di: Tangerang
pada tanggal:

Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG KOTA


SUGENG HARIYANTO, S.I.K., M.Hum.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71100497